



# Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Komunikasi dan Perubahan Sosial Pembangunan Ekonomi

Aaliyah Meidiana, Canisa Helmi

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

**Abstrak:** Tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dicanangkan pemerintah Indonesia adalah memberikan bantuan pangan secara langsung kepada keluarga miskin dan membutuhkan dengan menggunakan kartu elektronik. Penerima manfaat BPNT menerima saldo elektronik yang dapat dipergunakan untuk membeli berbagai jenis bahan pangan di toko yang telah bekerja sama dengan program, seperti pasar tradisional atau toko kelontong. Program BPNT bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan makanan bagi keluarga miskin dan rentan serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Dengan menggunakan kartu elektronik, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas distribusi makanan, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan, dan memperluas jangkauan program bantuan sosial. Dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi kelaparan, program BPNT telah menjadi salah satu alat penting.

**Keywords:** BPNT, Kelaparan, Bantuan Pangan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.352>

\*Correspondence: Aaliyah Meidiana

Email:

[2110115077@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110115077@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Received: 01-05-2024

Accepted: 15-06-2024

Published: 31-07-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

**Abstract:** An Indonesian government program called Non-Cash Food Assistance (BPNT) aims to provide food assistance directly to poor and needy families using electronic cards. BPNT beneficiaries receive an electronic balance that can be used to buy various types of food at stores that have collaborated with the program, such as traditional markets or grocery stores. The BPNT program aims to increase the accessibility and availability of food for poor and vulnerable families and ensure that the assistance provided is right on target. By using electronic cards, this program also aims to increase the effectiveness of food distribution, reduce the possibility of misuse, and expand the reach of social assistance programs. In the Indonesian government's efforts to overcome hunger, the BPNT program has become an important tool.

**Keywords:** BPNT, Famine, Food Aid

## Pendahuluan

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan berbentuk pangan non tunai bulanan yang dikirimkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang menengah kebawah dari segi ekonomi. Program ini diberikan melalui rekening elektronik melalui perantara kartu. Usaha mikro, usaha kecil, koperasi, pasar tradisional, dan Himpunan Bank Negara (Himbara) menerima langsung dana ini. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima kartu kombo (KKS) yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank penyaluran yang bekerja sama dengan program. KKS berfungsi sebagai alat untuk menukar

bantuan. Data para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar di DT-PPFM, yang merupakan hasil dari pemutakhiran Basis Data Terpadu pada tahun 2015, akan diberi kartu KKS. Kartu ini memiliki saldo sebesar RP 110.000,- yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di outlet e-warung yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kelebihan bansos pangan non tunai ini adalah penerima manfaat dapat mengoptimalkan bantuan yang dibutuhkan secara efektif dan efisien, sehingga meningkatkan kehidupan ekonomi mereka secara tidak langsung (Fang, 2023; Lofton, 2022; Shimada, 2022). Dengan merevitalisasi peran lembaga perbankan, hal ini akan memungkinkan pembiayaan inklusif bagi masyarakat miskin dan menghindari banyak inefisiensi dan inefektivitas seperti pemberian uang tunai dan bantuan sosial (Abia, 2021; Mahmoudi, 2022; Penco, 2022). Manajemen dalam industri ditandai dengan pelaksanaan kebijakan, pengaturan administrasi, dan upaya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu (Sheldon, 1966) dalam Kettner (2002). Penerima bantuan sosial dapat berperilaku produktif dengan menggunakan sistem perbankan untuk memberikan bantuan non-tunai. Selain itu, dapat lebih membuat transparansi dan akuntabilitas program meningkat sehingga memudahkan pengelolaan, pemantauan, dan pengurangan penyimpangan. Ini mewakili sistem manajemen yang baru (Sahinyazan, 2021; Unrath, 2021; Yang, 2021).

Pada program lain yaitu program Beras Sejahtera (Rastra) telah bertransformasi menjadi voucher elektronik (e-voucher) yang lebih tepat segmennya dan juga tidak sulit untuk dilacak. Voucher elektronik ini memungkinkan penggunaannya untuk belanja beras dan telur dalam kuantitas dan kualitas yang mereka inginkan (Carruth, 2021; Licitra, 2021; Valencia, 2021).

Oleh karena itu, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan dapat memberikan pertambahan tingkat kesejahteraan dan perekonomian penerima manfaat dalam jangka panjang dengan cara mendekati diri pada kelompok segmennya, memberikan pola makan yang lebih seimbang, memotivasi masyarakat berjualan, memberikan akses yang lebih baik terhadap pangan, makanan, jasa keuangan dan meningkatkan efisiensi rumah tangga (Hoogenboom, 2020; Huang, 2020; Muhammad, 2020; Sitko, 2021).

Saat ini pelaksanaan program BPNT mempunyai enam prinsip dasar, yakni tepat tujuan, tepat jumlah, tepat waktu, tepat pengelolaan, dan tepat kualitas. Keenam prinsip ini dapat digunakan dalam seluruh kegiatan BPNT. Namun dalam prakteknya terdapat berbagai kendala seperti perubahan data, saldo nol dan kesalahan.

Prinsip utama pada program BPNT adalah sebagai berikut:

- (a) Mudah digunakan dan diakses oleh Kader Pembangunan Manusia
- (b) Memberikan opsi lain kepada Kader Pembangunan Manusia tentang waktunya, berapa, jenis, kualitas dan harga bahan pangan (beras atau telur atau lainnya) serta tempat membeli sesuai dengan preferensi mereka (tidak diarahkan pada E-warung tertentu dan bahan pangan tidak dikemas)
- (c) Mendorong usaha eceran para masyarakat untuk mendapatkan pelanggan baru dan menghasilkan lebih banyak uang dengan melayani Kader Pembangunan Manusia.

- (d) Memungkinkan pelaku usaha untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dan kepada Kader Pembangunan Manusia.
- (e) Sebagai hasil dari kemampuan e-warung untuk membeli bahan pangan dari berbagai sumber, bank penyalur bertanggung jawab untuk menyalurkan dana bantuan ke rekening Kader Pembangunan Manusia, tetapi tidak bertanggung jawab untuk menyalurkan bahan pangan kepada Kader Pembangunan Manusia, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.

## Metode Penelitian

Penelitian kami telah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis program Bantuan Pangan Non Tunai dalam pengurangan ketimpangan atau kesenjangan di Indonesia sesuai dengan Tujuan 10 dari Sustainable Development Goals (SDGs) melalui prospek keberhasilan. Metode kualitatif deskriptif ialah pendekatan secara metodologis yang meliputi ringkasan komprehensif peristiwa atau pengalaman. Penelitian ini akan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan memahami kejadian yang dianggap sebagai penyimpangan sosial. Dalam pendekatan deskriptif kualitatif ini, tujuan adalah untuk menyelidiki dan mengelompokkan kejadian masyarakat. Tujuan dari pendekatan deskriptif kualitatif ini adalah untuk menunjukkan apakah pendekatan ini sesuai untuk penelitian ini atau tidak. Masalah yang sedang diselidiki ditentukan oleh fakta dan persepsi masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

### Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai

Program pemerintah Indonesia yang biasa disebut sebagai Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bertujuan untuk memberikan bantuan pangan secara langsung kepada keluarga miskin dan membutuhkan dengan menggunakan kartu elektronik. Program BPNT dapat dievaluasi dari berbagai sudut pandang:

- Cakupan dan Penyaluran Bantuan: Salah satu ukuran efektivitas program adalah seberapa banyak keluarga miskin dan rentan yang dapat diakses olehnya serta seberapa lancar proses penyaluran bantuan. Program ini dapat dianggap efektif dalam hal ini jika mampu mencakup banyak keluarga yang membutuhkan dan melakukan penyaluran dengan lancar.
- Dampak Sosial dan Ekonomi: Program ini juga dinilai dari dampaknya terhadap kesejahteraan penerima manfaat. Apakah bantuan masyarakat yang diberikan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dalam urusan pangan? Apakah bantuan ini membantu dalam meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan?
- Transparansi dan Akuntabilitas: Penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk program ini digunakan dengan efektif dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program ini menjadi faktor penting dalam menilai efektivitasnya.

- Inovasi dan Peningkatan: Seiring berjalannya waktu, penting untuk terus mengevaluasi program ini dan mencari cara baru untuk meningkatkan kinerjanya. Ini termasuk memperbarui teknologi, meningkatkan manajemen, dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial-ekonomi.

### **Dampak Program Bantuan Non Tunai**

Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mempunyai berbagai dampak, yang secara langsung juga yang tidak langsung pada penerima manfaat dan masyarakat secara umum. Beberapa dampak utama dari program ini antara lain:

- Meningkatkan Aksesibilitas Pangan: BPNT memungkinkan penerima manfaat untuk memperoleh akses yang lebih mudah dan terjamin terhadap bahan pangan yang dibutuhkan. Dengan adanya saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di berbagai pedagang, program ini membantu memastikan bahwa keluarga menengah kebawah untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka dengan lebih baik.
- Mengurangi Kelaparan dan Gizi Buruk: Dengan meningkatkan aksesibilitas pangan, BPNT dapat membantu mengurangi tingkat kelaparan dan gizi buruk di kalangan keluarga miskin dan rentan. Dengan mempermudah akses mereka ke makanan, program ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas gizi.
- Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Pedagang lokal seperti pasar tradisional dan toko kelontong dapat meningkatkan penjualan mereka dengan BPNT karena penerima manfaat dapat menggunakan saldo elektronik untuk berbelanja. Ini dapat membantu meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi lokal di berbagai wilayah.
- Mendorong Inklusi Keuangan: Dengan memberikan kartu bank untuk menerima bantuan, penerima manfaat BPNT dapat mulai memahami dan menggunakan layanan keuangan lainnya. Ini adalah cara lain program ini dapat mendorong inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan formal.
- Peningkatan Efisiensi Penyaluran Bantuan: Dibandingkan dengan sistem penyaluran bantuan pangan konvensional, BPNT dapat lebih efisien dalam hal administrasi dan monitoring. Penggunaan teknologi digital memungkinkan pemerintah untuk melacak penggunaan dana secara lebih akurat dan mencegah penyalahgunaan dana bantuan.

### **Analisis Teoritis Terhadap Implementasi/Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap SDGs 10**

Analisis teoritis terhadap Program Bantuan Non-Tunai (BPNT) terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-10, yaitu "Mengurangi Kesenjangan Dalam dan Antara Negara" dapat dilakukan dengan melihat bagaimana program ini berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di tingkat domestik. Beberapa cara dalam mewujudkannya bila dikaitkan dengan program BPNT ini, antara lain:

Pertama, akses yang merata terhadap bantuan pangan. BPNT menyalurkan bantuan pangan secara langsung kepada keluarga miskin dan rentan melalui kartu elektronik. Cara ini meningkatkan aksesibilitas bantuan pangan bagi mereka yang membutuhkan, sehingga membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam akses terhadap kebutuhan dasar.

Kedua, pemberdayaan kelompok rentan. BPNT memberikan kontrol yang lebih besar kepada keluarga miskin dan rentan dalam mengelola pengeluaran mereka untuk kebutuhan pangan. Penerima manfaat dapat membuat keputusan sendiri tentang jenis dan kualitas bahan pangan yang mereka beli, sehingga meningkatkan rasa harga diri dan otonomi mereka dalam mengelola kebutuhan pangan.

Ketiga, pengurangan kesenjangan regional. BPNT membantu mengurangi kesenjangan regional dalam akses terhadap bantuan sosial. Bantuan langsung melalui kartu elektronik memastikan bahwa bantuan tersebut disalurkan kepada mereka yang membutuhkan di berbagai daerah, tanpa memandang lokasi geografis atau tingkat perkembangan daerah tersebut.

Keempat, penggunaan teknologi untuk keadilan. BPNT memanfaatkan teknologi digital dalam penyaluran bantuan, memungkinkan pengawasan dan pelaporan yang lebih baik. Hal ini dapat untuk membantu mencegah penyalahgunaan bantuan dan mengamankan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada penerima manfaat yang tepat, sehingga mendorong keadilan dalam distribusi bantuan.

Kelima, partisipasi dan keterlibatan masyarakat. BPNT melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan bantuan pangan yang mereka terima. Hal ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi program, serta memberikan umpan balik yang berharga kepada pemerintah untuk perbaikan dan peningkatan program di masa mendatang.

Secara keseluruhan, BPNT merupakan program yang efektif dalam berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi di tingkat domestik, sehingga mendukung pencapaian SDGs ke-10. Penguatan dan pengembangan program ini secara berkelanjutan perlu dilakukan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dampak yang lebih signifikan dalam pengurangan kesenjangan.

## Simpulan

Kesimpulan dari implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Indonesia mencakup beberapa aspek penting, yaitu **Peningkatan Aksesibilitas dan Ketersediaan Pangan**, BPNT telah berhasil meningkatkan aksesibilitas bantuan pangan bagi keluarga miskin dan rentan di Indonesia. Dengan menggunakan saldo elektronik, penerima manfaat dapat memperoleh bahan pangan dengan lebih mudah, membantu mengurangi tingkat kelaparan dan gizi buruk di kalangan mereka. **Pemberdayaan Ekonomi Lokal**, Program ini juga telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal dengan memberdayakan pedagang lokal, seperti pasar tradisional dan warung kelontong, yang bekerja sama dengan BPNT. Hal ini meningkatkan pendapatan mereka dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. **Penggunaan Teknologi untuk Efisiensi**, Implementasi BPNT menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital

dalam penyaluran bantuan sosial dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan program. Penggunaan kartu elektronik memungkinkan pemerintah untuk melacak penggunaan dana secara lebih akurat dan mencegah penyalahgunaan dana bantuan. **Penurunan Kecurangan dan Penyalahgunaan**, Meskipun ada beberapa tantangan terkait dengan keamanan dan kecurangan dalam implementasi program, BPNT secara umum telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan dana bantuan. Penggunaan teknologi juga membantu dalam memantau dan melaporkan potensi penyalahgunaan dengan lebih efektif. **Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan**, Implementasi BPNT juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi program. Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat menerima umpan balik yang berharga dari masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas program.

Kesimpulan dari implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Indonesia mencakup beberapa aspek penting, yaitu peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan pangan, pemberdayaan ekonomi lokal, penggunaan teknologi untuk efisiensi, penurunan kecurangan dan penyalahgunaan, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan program ini lebih lanjut:

#### 1. Peningkatan Aksesibilitas dan Ketersediaan Pangan:

- Perluasan Jangkauan Geografis: Perluasan cakupan program ke daerah-daerah terpencil yang masih belum terjangkau. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur distribusi dan meningkatkan kerjasama dengan toko-toko lokal di daerah tersebut.
- Diversifikasi Bahan Pangan: Menambahkan variasi bahan pangan yang dapat dibeli dengan saldo BPNT agar penerima manfaat mendapatkan gizi yang lebih seimbang.

#### 2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal:

- Pelatihan dan Dukungan untuk Pedagang Lokal: Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada pedagang lokal yang berpartisipasi dalam program BPNT agar mereka dapat mengelola usaha mereka dengan lebih baik dan memenuhi standar kualitas bahan pangan yang lebih tinggi.
- Promosi Produk Lokal: Mendorong penggunaan dan promosi produk-produk lokal dalam program BPNT untuk mendukung petani dan produsen lokal.

#### 3. Penggunaan Teknologi untuk Efisiensi:

- Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Memastikan bahwa semua daerah memiliki akses yang memadai terhadap teknologi yang diperlukan untuk pelaksanaan program, termasuk akses internet dan perangkat elektronik yang memadai.
- Pengembangan Aplikasi Mobile: Mengembangkan aplikasi mobile yang user-friendly bagi penerima manfaat dan pedagang untuk memantau saldo, transaksi, dan melaporkan masalah secara real-time.

#### 4. Penurunan Kecurangan dan Penyalahgunaan:

- Penguatan Sistem Keamanan: Meningkatkan sistem keamanan data dan transaksi untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan, termasuk penggunaan teknologi blockchain untuk transparansi.
- Pengawasan Berlapis: Mengimplementasikan sistem pengawasan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.

## 5. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan:

- Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi: Melakukan edukasi dan kontak atau komunikasi lebih dekat dengan masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pengawasan program dan cara melaporkan penyimpangan.
- Pembentukan Komite Pengawas: Membentuk komite pengawas di tingkat lokal yang terdiri dari perwakilan masyarakat, LSM, dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan aturan.

Dengan melaksanakan saran-saran di atas, diharapkan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi keluarga miskin dan rentan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Abia, W. A. (2021). Tropane alkaloid contamination of agricultural commodities and food products in relation to consumer health: Learnings from the 2019 Uganda food aid outbreak. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 20(1), 501–525. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12664>
- Carruth, L. (2021). Aid or exploitation?: Food-for-work, cash-for-work, and the production of “beneficiary-workers” in Ethiopia and Haiti. *World Development*, 140. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105283>
- Fadlurrohman, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (N.D.). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi)*, 9, 122-129. 10.24198/Share.V9i2.20326
- Fang, Y. (2023). Konjac Glucomannan: An Emerging Specialty Medical Food to Aid in the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus. *Foods*, 12(2). <https://doi.org/10.3390/foods12020363>
- Hermawan, S.P., M.Si. (2021, Desember 31). Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. *Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai Di Kota Yogyakarta*, 12 Nomor 2, 131-145.
- Hoogenboom, R. L. A. P. (2020). Congener patterns of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans and biphenyls as a useful aid to source identification during a contamination incident in the food chain. *Science of the Total Environment*, 746. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141098>
- Huang, X. (2020). AIEgens: An emerging fluorescent sensing tool to aid food safety and quality control. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 19(4), 2297–2329. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12591>
- Jatmiko, A., & Kholiq, R. (2023, Desember 21). *Bantuan Pangan Non Tunai, Definisi, Dasar Hukum, Dan Cara Mengeceknnya*. Wikipedia. Retrieved June 2, 2024, From <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/65839f989c180/Bantuan-Pangan-Non-Tunai-Definisi-Dasar-Hukum-Dan-Cara-Mengeceknnya>
- Licitra, R. (2021). Nutraceutical screening in a zebrafish model of muscular dystrophy: Gingerol as a possible food aid. *Nutrients*, 13(3), 1–12.

<https://doi.org/10.3390/nu13030998>

- Lofton, S. (2022). Mutual aid organisations and their role in reducing food insecurity in Chicago's urban communities during COVID-19. *Public Health Nutrition*, 25(1), 119–122. <https://doi.org/10.1017/S1368980021003736>
- Mahmoudi, M. (2022). Decision support models for managing food aid supply chains: A systematic literature review. *Socio-Economic Planning Sciences*, 82. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2022.101255>
- Ma'ruf, F. S., & Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (2022). *Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Mensejahterahkan Keluarga Kurang Mampu Di Tangerang*.
- Muhammad, I. (2020). Exploration of bambara groundnut (*Vigna subterranea* (L.) verdc, an underutilized crop, to aid global food security: Varietal improvement, genetic diversity and processing. *Agronomy*, 10(6). <https://doi.org/10.3390/agronomy10060766>
- Otoritas Jasa Keuangan. (N.D.). Mengenal Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt). *Wikipedia*. <https://Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id/Frontend/Cms/Article/10471>
- Pembangunan Sosial Adalah. (N.D.). *Wikipedia*. Retrieved June 2, 2024, From [https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pembangunan\\_Sosial](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pembangunan_Sosial)
- Penco, L. (2022). Open social innovation for surplus food recovery and aid during COVID-19 crisis: the case of Fondazione Banco Alimentare Onlus. *British Food Journal*, 124(6), 1875–1894. <https://doi.org/10.1108/BFJ-02-2021-0116>
- Sahinyazan, F. G. (2021). Food Aid Modality Selection Problem. *Production and Operations Management*, 30(4), 965–983. <https://doi.org/10.1111/poms.13287>
- Shimada, G. (2022). The impact of climate-change-related disasters on africa's economic growth, agriculture, and conflicts: Can humanitarian aid and food assistance offset the damage? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(1). <https://doi.org/10.3390/ijerph19010467>
- Sitko, N. J. (2021). Does receiving food aid influence the adoption of climate-adaptive agricultural practices? Evidence from Ethiopia and Malawi. *Food Policy*, 102. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2021.102041>
- Thalia, W. (2020, Agustus 19). *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*. *Wikipedia*. Retrieved June 2, 2024, From [https://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/1180/2/E21116007\\_Skripsi\\_%20%20%201-2.Pdf](https://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/1180/2/E21116007_Skripsi_%20%20%201-2.Pdf)
- Tnp2k. (2021, Mei 10). *The Impact Of The Transition Of The Rastra Program To Bpnt*. *Wikipedia*, The Free Encyclopedia. Retrieved June 2, 2024, From <https://Www.Tnp2k.Go.Id/Articles/The-Impact-Of-The-Transition-Of-The-Rastra-Program-To-Bpnt>
- Unrath, N. (2021). Application of whole genome sequencing to aid in deciphering the persistence potential of listeria monocytogenes in food production environments. *Microorganisms*, 9(9). <https://doi.org/10.3390/microorganisms9091856>
- Valencia, I. J. C. (2021). A Maximization Model for Food Aid Distribution using Integer Linear Programming. *2021 IEEE 13th International Conference on Humanoid*,

*Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment, and Management, HNICEM 2021.* <https://doi.org/10.1109/HNICEM54116.2021.9732003>

Yang, H. (2021). Effect of pyrolysis conditions on food waste conversion to biochar as a coagulant aid for wastewater treatment. *Journal of Water Process Engineering*, 41. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102081>

Yunus, E. Y., & Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga Probolinggo. (2019). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo*, 9 Nomor 2. <Http://Dx.Doι.Org/10.33366/Rfr.V9i2.1454>